

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN TABALONG

INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON POVERTY RATE IN TABALONG REGENCY

Nurul Izzati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
Jl. Penghulu Rasyid No. 4 Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: izzatinurul.17098@gmail.com

Diserahkan: 30/07/2018, Diperbaiki: 25/09/2018, Disetujui: 13/11/2018

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang masih dihadapi Kabupaten Tabalong. Pengentasan kemiskinan terus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melalui berbagai kebijakan dan program yang didukung oleh semua *stakeholder*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan angka kemiskinan selama lima belas tahun dan dianalisis dengan regresi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap angka kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, Kabupaten Tabalong

Abstract

Poverty is a multidimensional problem that is still faced by Tabalong Regency. Poverty alleviation is continuously to be integrated comprehensively and its involving various aspects of the community life. One of the efforts by the government of Tabalong Regency to reduce poverty is using various policies and programs that supported by all stakeholders. In 2016 and 2017, the poverty rate was reduced that were probably due to the positive impacts of government programs and policies on economic development that can be seen from two variables such as economic growth and government expenditure. This study aims to find out the influence of economic growth and government expenditure on poverty in Tabalong Regency. This study uses the explanatory research with the quantitative method. This study uses secondary data of economic growth and government expenditure in fifteen years and analyzed by using a regression analysis. The results of this study proved that the government expenditure has an effect on the poverty rate, while the economic growth does not affect the poverty rate in Tabalong Regency. The output of this research can be used as a recommendation for the policy makers in relation with the poverty alleviation.

Keywords: poverty rate, economic growth, government expenditure, Tabalong Regency

PENDAHULUAN

Menurut Amalia & Razak (2015), kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Masalah-masalah ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang tercermin dalam ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup standar. Kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi, ketidakmampuan mengakses pelayanan kesehatan,

tingkat pendidikan yang rendah, perumahan yang tidak layak dan kesulitan air bersih. Seterusnya, tingkat pendidikan yang rendah juga mempersulit seseorang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi. Kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, perumahan kumuh, ketiadaan air bersih juga membuat kondisi gizi seseorang menjadi rentan. Keadaan sakit tentu saja mempersulit seseorang untuk memperoleh mata pencaharian, yang pada ujungnya mengarah pada kemiskinan.

Menurut hasil Susenas pada tahun 2017 kemiskinan di Indonesia mencapai 10,12% (BPS 2018). Meskipun jumlah tersebut turun dari tahun

2016 yang mencapai angka 10,70% (BPS 2017), namun dengan adanya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun maka penurunan persentase itu menjadi kurang bermakna karena secara absolut jumlah penduduk miskin di tahun 2017 masih sebesar 26,58 juta. Jumlah ini berkurang sebanyak 1,18 juta orang dibanding tahun 2016, sementara pertumbuhan penduduknya sebesar 1,49% per tahun atau setara dengan penambahan 4 juta penduduk (BPS 2018).

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan (Amalia & Razak 2015). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menyumbang persentase penduduk miskin dengan angka 4,70% pada tahun 2017 (BPS Provinsi Kalsel 2018). Di Kabupaten Tabalong, khususnya, pada tahun 2017 persentase penduduk miskin mencapai 6,09% dengan jumlah sebanyak 15.000 jiwa (BPS Kabupaten Tabalong 2018). Meskipun persentase masih lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Selatan, namun sudah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 6,35%. Penurunan ini diikuti juga oleh turunnya indeks keparahan kemiskinan yang pada tahun 2016 berada di 0,24 menjadi 0,23 di tahun 2017 (BPS Kabupaten Tabalong 2017).

Jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tabalong di tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,63% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 3,06% (BPS Kabupaten Tabalong 2018). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu target prioritas pembangunan suatu negara, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Menurut Mankiw (2006), pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik regional bruto adalah rangkuman aktivitas ekonomi suatu masyarakat selama periode waktu tertentu. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkatkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dalam jangka panjang, sangat penting bagi penurunan atau pengentasan kemiskinan. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu menciptakan atau meningkatkan kesempatan kerja

yang berarti mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan upah/pendapatan dari kelompok miskin (Tambunan 2016).

Studi yang dilakukan oleh (Sumartono 2002) dalam (Kuncoro 2010) dari SMERU *Research Institute* memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang. Selain itu, hasil riset tersebut juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara temporer dapat mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan penting untuk pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat *pro-poor* atau berpihak kepada orang miskin. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tanpa intervensi pemerintah, maka kelompok miskin tak akan dapat menikmati keuntungan dari pertumbuhan tersebut karena mekanisme pasar yang tidak bekerja sempurna. Dengan demikian, diperlukan kebijakan mengenai alokasi anggaran dalam pengeluaran pemerintah untuk program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan.

Peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pembangunan dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia & Razak 2015), dapat memberikan dampak yang sangat positif dalam pembangunan dan berperan dalam mengatasi kemiskinan di daerah.

'Sunusi (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merefleksikan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli suatu barang atau jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dumairy (1996) dalam 'Sunusi (2014) juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian.

Kenaikan pengeluaran pemerintah mendorong adanya kenaikan pendapatan yang lebih besar. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi juga lebih tinggi. Jadi, ketika terjadi kenaikan belanja pemerintah, maka akan terjadi peningkatan pendapatan, yang selanjutnya akan menaikkan konsumsi dan seterusnya (Mankiw 2006).

Peran pemerintah dalam alokasi penyediaan barang publik melalui pengeluaran pemerintah jelas mempengaruhi aktivitas ekonomi. Todaro & Smith (2006), menyatakan penyediaan berbagai macam barang dan jasa yang diperuntukkan bagi penduduk paling miskin, merupakan hal yang cukup berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, seperti pengadaan proyek perbaikan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan serta pinggir dan pusat pemukiman kumuh yang terdapat di kota, penyediaan makan siang gratis bagi para siswa sekolah, program perbaikan gizi bagi anak prasekolah, pembangunan tangki-tangki air bersih, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil, transfer uang secara langsung dan program subsidi pangan bagi orang-orang miskin, atau campur tangan langsung pemerintah yang mengupayakan agar harga bahan pangan pokok selalu murah, mencerminkan bentuk lain dari subsidi konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, sepanjang kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan tersebut diarahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji atau meneliti hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan. Penelitian Cheema & Sial (2012), yang menganalisis hubungan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan di Pakistan pada tahun 1993-2008. Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan kenaikan ketimpangan pendapatan, tingkat elastisitas kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di perkotaan dan sebaliknya, elastisitas ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di daerah perkotaan daripada di pedesaan.

Sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut, 'Sunusi (2014), melalui metode *path analysis* juga mengemukakan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2001-2010, selain pengaruh faktor jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yunizarrahman (2018), yang mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bukti empiris bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, yang berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan. Penelitian yang dilakukan –Sudarnan (2015), justru

memberikan bukti yang sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya Indiatuti & Anshory (2015), yang mengkaji dampak sektor pertambangan untuk pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan dengan menggunakan analisis data panel menunjukkan bahwa sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara statistik pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Penelitian Sri & Suliswanto (2010) menemukan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan hanya pada α 20%. Hal ini sesuai temuan dari World Bank (2006), bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan karena terjadinya ketimpangan pada pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 1998, pertumbuhan ekonomi bukan saja berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga menjadi semakin kurang merata. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Menurut World Bank (2006), pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga kebutuhan pokok.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kenaikan pengeluaran pemerintah memberikan kesempatan untuk penambahan alokasi anggaran terkait penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah seharusnya memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini eksplanatori, yaitu fokus menguji teori yang sudah ada pada konteks penelitian yang berbeda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Tabalong serta dokumen publikasi Tabalong dalam Angka keluaran BPS Kabupaten Tabalong selama 15 (lima belas) tahun yaitu 2003-2017. Selain itu, juga berasal dari kajian literatur. Data yang terkumpul dianalisis dengan regresi *time series* menggunakan *software eviws 8*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari angka kemiskinan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan (AK), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dan dinyatakan dalam persen (%).
2. Pertumbuhan Ekonomi (PE) dikodifikasi sebagai β_1 , menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam periode waktu tertentu yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam persen (%).
3. Pengeluaran Pemerintah (PP) dikodifikasi menjadi β_2 , yaitu nilai realisasi total belanja pemerintah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dinyatakan dengan satuan rupiah.

Model Penelitian

Model penelitian ini mengacu pada model yang digunakan oleh –Sudarlan (2015), yang dimodifikasi berlandaskan pada teori tentang kemiskinan. Bentuk fungsi yang disusun adalah:

$$AK = f(PE, PP)$$

Keterangan:

AK = Angka Kemiskinan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

Kemudian bentuk fungsi persamaan tersebut diubah menjadi model persamaan regresi. Model persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$AK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PP_{it} + \epsilon_t$$

Keterangan:

AK = Angka Kemiskinan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen

t = 1, 2, ..., 15 (data *time series* periode waktu 2003-2017)

ϵ_t = *error term*

Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan studi literatur yang dilakukan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁: ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong

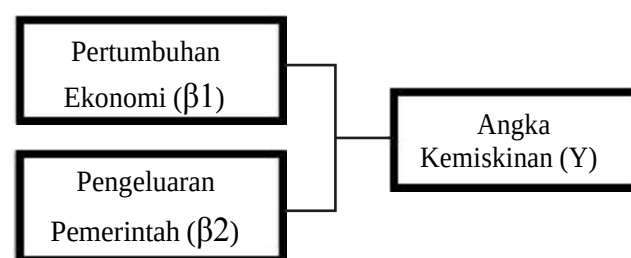
H₂: ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong

H₃: ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong

Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian ini adalah kemiskinan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.

Secara garis besar, kerangka penelitian disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka penelitian

Uji Asumsi Klasik

Agar model dapat dianalisis dan memberikan hasil yang representatif (*BLUE-Best, Linear, Unbiased Estimator*), maka model tersebut harus memenuhi pengujian asumsi klasik berupa (Widarjono, 2013):

1. Uji Multikolinearitas, yaitu untuk mendeteksi adanya hubungan linier antara variabel independen dalam regresi yang dilakukan dengan cara menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen dengan *rule of thumb*. Jika koefisien korelasi di atas 0,85, maka diduga ada multikolinearitas antar sampel. Sebaliknya, jika koefisien korelasinya rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinearitas.
2. Uji Heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat varian yang tidak konstan dari variabel gangguan. Heteroskedastisitas sering ditemui dalam data *cross section* karena mempunyai sifat dan karakter individu yang berbeda-beda, sedangkan pada data *time series* jarang mengandung unsur ini karena perilaku data individu yang sama dari waktu ke waktu fluakuasinya relatif stabil. Uji ini dilakukan dengan cara uji *White*. Jika $Obs \cdot R^2$ lebih dari α , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
3. Uji Autokorelasi, yaitu untuk mengetahui korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Jika $Obs \cdot R^2$ lebih dari α , maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Pengujian Kriteria Statistik

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari determinasi R^2 , nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Ghozali, 2016) dalam (Yunizarrahman, 2018). Uji R^2 , uji F, dan uji t secara singkat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji koefisien determinasi R^2)

Nilai R^2 menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit model* yang digunakan. (Sriyana, 2014) menyatakan bahwa koefisien determinasi memberikan indikasi pada ketepatan garis regresi dengan datanya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin eratny hubungan antara variabel bebas/independen dengan variabel terikat/dependen.

2. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis pada uji F dilakukan secara langsung dengan konsep *p-value* yang dilihat dari besarnya probabilitas dan membandingkannya dengan tingkat signifikansi (α). Apabila nilai probabilitas kurang dari α , maka berarti H_0 ditolak, yang berarti secara simultan variabel-variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

3. Uji t (Uji Signifikansi Individual)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji dengan konsep *p-value*, yaitu dengan membandingkan *p-value* dengan level signifikansi (α). Apabila nilai *p-value* kurang dari α , berarti H_0 ditolak, berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013).

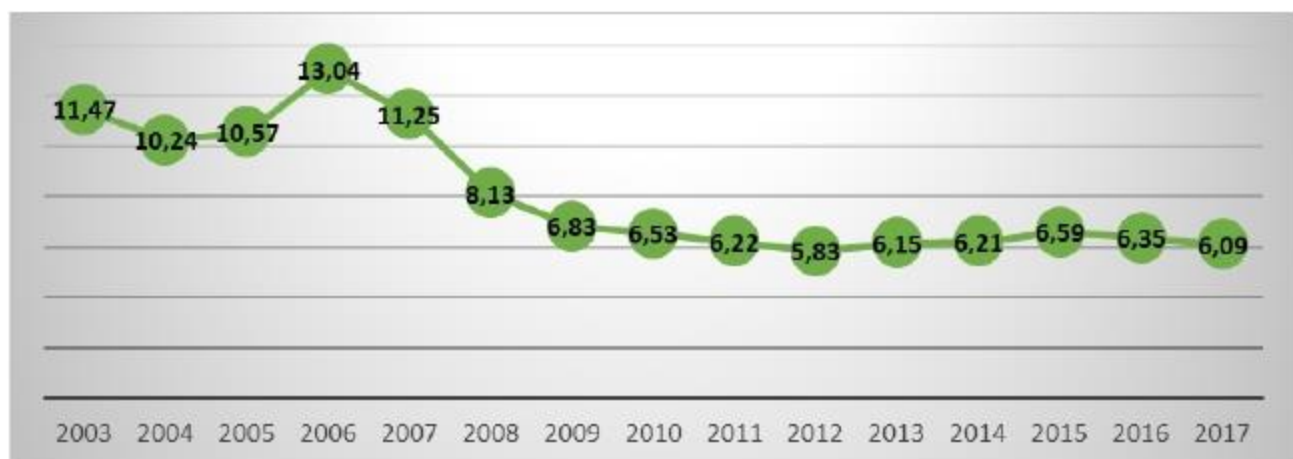
HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Tabalong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) adalah $\pm 3.946 \text{ km}^2$ atau $\pm 394.600 \text{ Ha}$ yang secara geografis terletak antara $115^\circ 9' - 115^\circ 47' \text{ BT}$ dan $1^\circ 18' - 2^\circ 25' \text{ LS}$, yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 121 (seratus dua puluh satu) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan. Berikut adalah deskriptif data angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Tabalong dari tahun 2003-2017.

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang disajikan berupa persentasi penduduk miskin di Kabupaten Tabalong. Secara tren, presentase ini mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong menunjukkan hasil yang positif. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2. Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2003-2017 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2003-2018 (diolah)

Gambar 2 menunjukkan persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Selama kurun waktu lima belas tahun, tren angka kemiskinan berfluktuasi namun cenderung menurun. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,04% disebabkan oleh tiga faktor yaitu kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi, kegagalan program kompensasi subsidi bbm bagi keluarga hampir miskin dan tidak stabilnya harga kebutuhan barang pokok. Tahun-tahun

berikutnya, angka kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun 2012 yaitu 5,83%. Tahun 2013 hingga 2015, angka kemiskinan kembali mengalami tren kenaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh harga komoditas unggulan yaitu karet mengalami peningkatan harga, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat ikut meningkat. Berikut disajikan fluktuasi pertumbuhan sektor komoditas utama di Kabupaten Tabalong



Gambar 3. Fluktuasi Komoditas Utama di Kabupaten Tabalong Tahun 2012-2016

Sumber: PDRB Lapangan Usaha ADHB, BPS Kabupaten Tabalong, 2012-2016 (diolah)

Sepanjang tahun 2011-2016, sektor pertanian mengalami pasang surut yang sangat signifikan sehingga berimbas pada pendapatan dan daya beli penduduk di Kabupaten Tabalong, khususnya petani karet. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong juga dipengaruhi oleh sektor batubara. Sepanjang tahun 2012 hingga 2016, tren sektor pertambangan selalu mengalami penurunan, hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor ini. Tahun 2016 menuju ke 2017, pertambangan batubara sudah lebih stabil dibanding

tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan (Tim Sekretariat Kemiskinan, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kata lain tujuan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan PDRB. PDRB Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2016 (miliar rupiah)

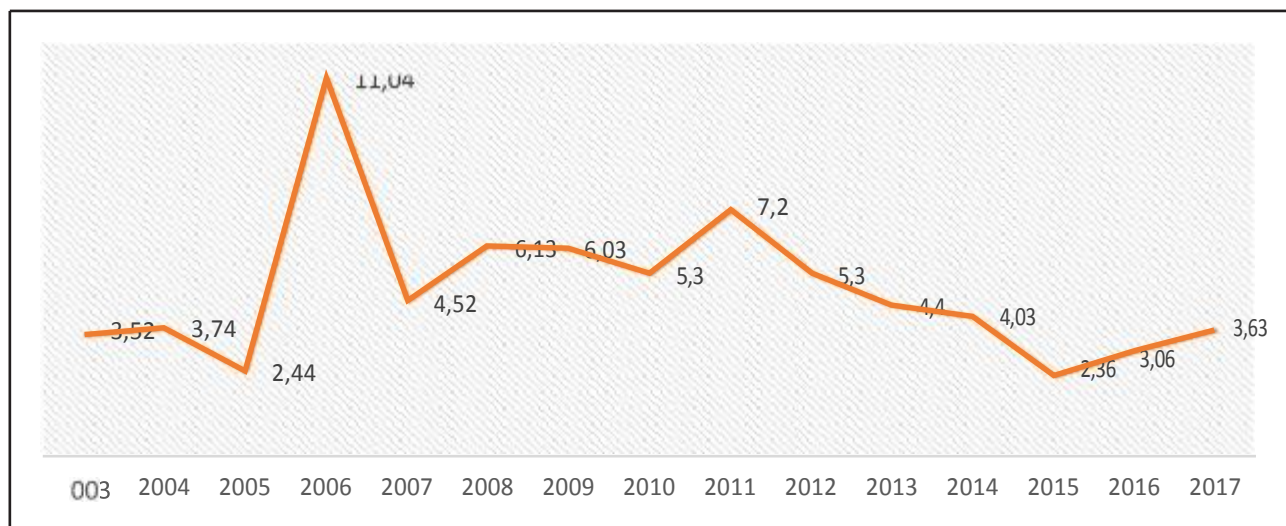
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2010	10.292,20	10.292,20
2011	12.204,20	11.036,32
2012	12.921,96	11.625,11
2013	13.812,14	12.132,17
2014	14.737,13	12.621,20
2015	14.846,40	12.925,33
2016	15.275,97	13.326,72
2017	16.441,08	13.833,27

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2010-2017 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tabalong pada tahun 2010 berjumlah 10.292,20 miliar rupiah dan mengalami kenaikan sebesar 59,74% sampai dengan tahun 2017 atau berjumlah 16.441,08 miliar rupiah. PDRB Atas Harga Konstan pada tahun 2017 berjumlah 13.833,27 miliar rupiah atau naik sebesar 34,40% dari tahun 2010

yang berjumlah 10.292,20 miliar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 2003-2017, pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global maupun secara nasional dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2004-2017 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2003-2017 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong tahun dari 2003 hingga 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Sejalan dengan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,4 dan terus menurun di tahun berikutnya, yaitu 4,03 hingga terpuruk di tahun 2015 hanya sebesar 2,36. Pertumbuhan ekonomi menguat lagi di tahun 2016 yaitu sebesar 3,06 dan meningkat di tahun berikutnya yaitu sebesar 3,63. Hal ini sejalan dengan fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada periode yang sama.

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pengeluaran pemerintah daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Variabel pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengeluaran pemerintah Kabupaten Tabalong dari tahun 2003-2017. Berikut disajikan pengeluaran pemerintah Kabupaten Tabalong dalam tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2003-2017

Tahun	Total Belanja
2003	204.545.426.290
2004	204.767.463.000
2005	228.757.156.045
2006	437.641.255.979
2007	526.221.977.725
2008	593.618.071.208
2009	624.833.730.693
2010	721.280.773.949
2011	815.834.328.341
2012	901.113.149.441
2013	809.762.231.830
2014	833.410.766.000
2015	1.146.511.910.560
2016	1.320.898.011.670
2017	1.634.738.495.976

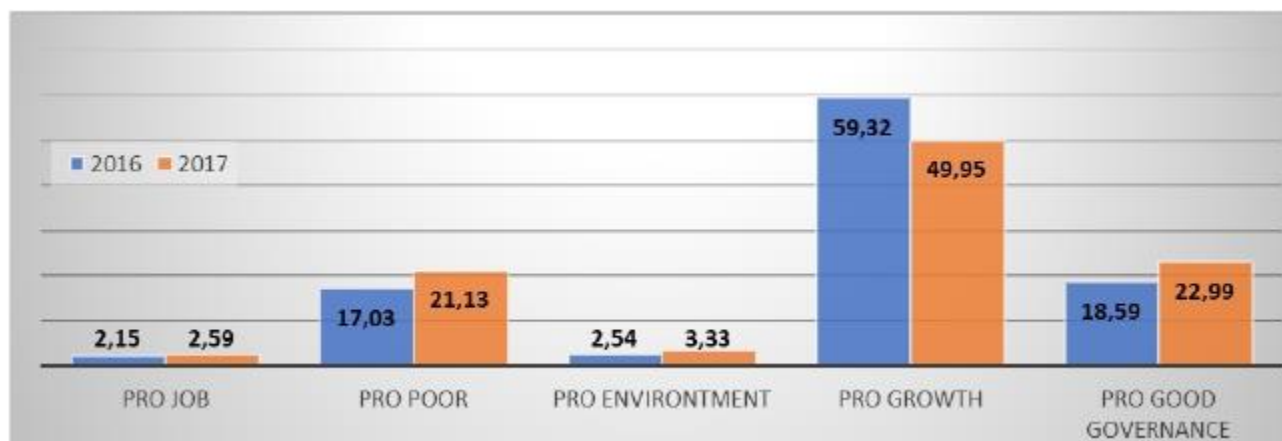
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (2003-2017), Tabalong dalam Angka, 2003-2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 2 pengeluaran pemerintah Kabupaten Tabalong dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan. Tahun 2003 jumlah total pengeluaran sebesar Rp. 204,54 miliar dan pada tahun 2017 naik sebesar Rp. 1.429,19 miliar sehingga menjadi Rp. 1.634,73 miliar atau naik rata-rata Rp. 95,27 miliar per tahun.

Lebih spesifik lagi, untuk alokasi anggaran

terkait program penanggulangan kemiskinan disajikan dalam tabel di bawah ini. Alokasi anggaran yang berdampak langsung terhadap program penanggulangan kemiskinan berada pada strategi *pro-job* dan *pro-poor* yang secara proporsi mengalami kenaikan di tahun 2017.



Gambar 5. Alokasi Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2017 (%)

Sumber: e-planning Kabupaten Tabalong 2016-2017 (diolah)

Pengujian Hipotesis

Untuk uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji multikolinearitas mendapatkan hasil PE-PP: $r(-0,205185) < 0,85$, maka tidak ada masalah multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas mendapatkan nilai sebesar $9,009891 > \alpha$, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sementara untuk uji autokorelasi mendapatkan nilai sebesar $7,93466 > \alpha$, maka juga dapat disimpulkan tidak mengalami

autokorelasi. Oleh karena itu, pengujian dapat dilanjutkan.

Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini, di bawah ini dipaparkan hasil dari uji signifikansi simultan (uji F), koefisien determinasi (R^2), dan uji signifikansi individual (uji t). Berikut disajikan ringkasan hasil estimasi regresi *time series* menggunakan *software eviws 8*

Tabel 3. Ringkasan Hasil Regresi *Time Series*

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	p-value	Keterangan
Konstanta	-10.54456	6.673640	1.68195	0.0000	
PE	0.143880	0.651588	1.68195	0.5269	Tidak Siginifikan
PP	-4.28E-12	-3.610332	1.68195	0.0036	Signifikan
R-squared	0.556515				
Adjusted R-square	0.482601				
F-statistic	7.529204				
Prob (F-statistic)	0.007608				

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa probabilitas (*F-statistic*) lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 0,007608 artinya menolak hipotesis nol (H_0). Kesimpulannya adalah keseluruhan variabel independen yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dan pengeluaran pemerintah (PP) secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh signifikan terhadap variabel Angka Kemiskinan (AK) di Kabupaten Tabalong.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit model* yang digunakan dengan nilai sebesar 0,556515, artinya bahwa variasi variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan

ekonomi (PE) dan pengeluaran pemerintah (PP) dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 55,65% dan sebesar 44,35% ($1 - 0,556515 = 0,443485$) dari variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Sedangkan nilai *Adjusted R-squared* atau koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 0,482601, artinya variasi variabel independen (PE, PP) menjelaskan variasi variabel dependen (AK) adalah sebesar 48,26% dan sebesar 51,74% dijelaskan variasi variabel-variabel lain di luar model.

Pengujian Signifikansi Individual (Uji t)

Hasil pengujian signifikansi individual bisa dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*), apabila nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan dengan nilai *p-value* sebesar 0,0036 ($< 0,05$), sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong dengan nilai *p-value* 0,5269 ($> 0,05$).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi individual (uji t-statistik) yang dilakukan, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong, di tahun 2006 daerah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 11,04% namun angka kemiskinan di tahun yang sama juga paling tinggi yaitu sebesar 13,04%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, di mana angka kemiskinan sebesar 6,09% namun pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 3,63%.

Dari penjelasan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Hasil tersebut berbeda dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Yunizarrahman, 2018), hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi kemungkinan hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat saja dan meninggalkan sebagian besar masyarakat miskin, sehingga kenaikan perekonomian hanya dinikmati sebagian kelompok tertentu, sementara golongan masyarakat miskin tidak memperoleh kenaikan yang berarti. Hal ini sejalan dengan penurunan pendapatan masyarakat miskin

yang berprofesi sebagai petani karet akibat harga karet sempat anjlok di medio 2015 dan belum cukup stabil hingga sekarang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih ditopang oleh sektor konsumsi dari pada peran investasi atau pembentukan modal, sehingga kualitas pertumbuhan tidak begitu baik untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini bersesuaian dengan perkembangan PDRB Kabupaten Tabalong yaitu sektor konsumsi bergerak ke arah positif daripada sektor investasi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi individual (uji t-statistik) yang dilakukan, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif (-4.28E-12) dan signifikan yang artinya setiap terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah rata-rata sebesar 1 milyar, maka akan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong sebesar (-4.28E-12) = 0,00428% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Penelitian yang dilakukan (Barika, 2013) sejalan dengan hasil penelitian di atas yang mendukung hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan angka kemiskinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin menurunkan angka kemiskinan provinsi di Sumatera, terutama pengeluaran pada belanja modal ataupun pengembangan infrastruktur.

Pengaruh peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari total pengeluaran pemerintah periode tahun 2003-2017 yang menunjukkan tren terus meningkat dan tren angka kemiskinan yang menurun. Pada periode tersebut, pengeluaran pemerintah terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar Rp. 95,27 miliar dan angka kemiskinan yang menurun dari 11,47% pada tahun 2003 menjadi 6,09% pada tahun 2017. Secara proporsi, alokasi anggaran untuk program terkait penanggulangan kemiskinan yaitu sektor *pro-job* dan *pro-poor* juga mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Hal ini berarti, peningkatan pengeluaran pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan. Sementara, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka implikasi kebijakan yang dapat diajukan dalam pengentasan kemiskinan memerlukan dukungan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal penyusunan anggaran yang tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat serta perlunya peningkatan kesadaran lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan mengingat permasalahan ini terkait berbagi sektor. Selain itu, diperlukan analisis sektor lain yang turut mempengaruhi angka kemiskinan sehingga arah kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, M. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Langsung terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 85–102. Retrieved from <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/362/352>
- Amalia, R., & Rahman Razak, A. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat." *Jurnal Analisis*, 4(2), 183–189.
- Bank, W. 2006. "Making the New Indonesia Work for the Poor." Washington, DC.
- Barika. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Sumatera." *Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 5, 27–36.
- BPS. 2004. "Tabalong dalam Angka 2004." (Vol. 1403.63.09). Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2006. "Tabalong dalam Angka 2005/2006." (Vol. 63). Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2007. "Tabalong dalam Angka 2006/2007". Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2008. "Tabalong dalam Angka 2008." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2009. "Tabalong dalam Angka 2009." (Vol. 63). Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2010. "Tabalong dalam Angka 2010." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2012. "Tabalong dalam Angka 2012." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2013. "Tabalong dalam Angka 2013." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2014. "Tabalong dalam Angka 2014." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2015. "Tabalong dalam Angka 2015." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2016. "Tabalong dalam Angka 2016." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- BPS. 2017. "Tabalong dalam Angka 2017." Tanjung Tabalong. Retrieved from tabalongkab.bps.go.id
- Cheema, A. R., & Sial, M. H. 2012. "Poverty, Income Inequality, and Growth in Pakistan: A Pooled Regression Analysis." *The Lahore Journal of Economics*, 17(2), 137–157. Retrieved from [http://www.lahoreschoolofeconomics.edu.pk/EconomicsJournal/Journals/Volume 17/Issue 2/06 Cheema .pdf](http://www.lahoreschoolofeconomics.edu.pk/EconomicsJournal/Journals/Volume%2017/Issue%2006/Cheema.pdf)
- Indiastuti, R., & Anshory Yusuf, A. 2015. "Impact Of Mining Sector To Poverty And Income Inequality In Indonesia: A Panel Data Analysis." *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 4(06). Retrieved from www.ijstr.org
- Kuncoro, M. 2010. "Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan." Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. 2006. "Makroekonomi." Edisi 6. Erlangga, Jakarta.
- Sekretariat, T. 2017. "Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tabalong." Tanjung Tabalong.
- Sri, M., & Suliswanto, W. 2010. "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366. <https://doi.org/10.22219/JEP.V8I2.361>
- Sriyana, J. 2014. "Metode Regresi Data Panel (Edisi 1)." Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarlan. 2015. "Contribution Of Human Development Index On Per Capita Income Growth And Poverty Alleviation In Indonesia." *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 4(08). Retrieved from www.ijstr.org
- Sunusi, D. 2014. "Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 (2). Retrieved from

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732>

- Tambunan, T. 2016. "Pembangunan Ekonomi Inklusif." Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. Smith, S. 2006. "Pembangunan Ekonomi." Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widarjono, A. 2013. "Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya." Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yunizarrahman. 2018. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan." Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id>

